

DAFTAR PUSTAKA

- Ambia, N. (2018). Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan. *PUBLIK REFORM: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 3.
- Andini, U. H. (2015). Pemberdayaan ekonomi masyarakat dari desa tertinggal menuju desa tidak tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Astarika, R., Partini, P., & Sulastri, E. (2018). Resistensi Program Pemberdayaan Pemukiman Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 7(3), 146-156.
- Bakhtiar, A. Z. (2020). Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin Tentang Suku Anak Dalam. *Unes Law Review*, 386-389.
- Cahyadi, V. W., & Setiadi, S. Parohan: Strategi Politik Lokal Orang Rimba dalam Menghadapi Tekanan Kontestasi Penguasaan Lahan. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(1), 32-48.
- Damanik, Y. T., & Marom, A. (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 221-232.
- Dwiyanto, Agus. 2018. Ilmu Administrasi Publik di Indonesia. Jl Sendok Karanggayam : Yogyakarta
- Eliza, F. R., Ridwan, M., & Noerjoedianto, D. (2018). Peran Pemerintah Terhadap Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (Suku anak dalam) Di Provinsi Jambi Tahun 2018. *Jurnal Kesmas Jambi*, 2(1), 40-49.
- Erhan, H., Asri, S., & Santosa, A. (2022). Implementasi program pemberdayaan komunitas adat terpencil di Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. *Journal Publicuho*, 5(4), 1329-1342.
- Budianto, E. T. (2016) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT. *e-Jurnal Katalogis*, 4(4), 137-145
- Fery, I. 2018. Rumah Bagi Orang Rimba Gagal Berulang Kali, Mengapa? www.mongobay.com
- Handayani, P.T., & Santi (2023) EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI KERJA PENGURUSAN LULUSAN SMA/K DI KOTA SAMARINDA. *Journal Administrasi Publik* 11(4)
- Hartatik, H. (2010). PENGARUH PEMBANGUNAN PERMUKIMAN MASYARAKAT DAYAK BAWO TERHADAP PERUBAHAN KEBUDAYAANNYA. *Naditira Widya*, 4(1), 79-94.
- Hasan. (2013). Pemberdayaan Sosial Ekonomi Komunitas Adat terpencil (KAT) Dalam Rangka Pengentasan kemiskinan. *Jurnal*

Sosiologi, 77-91.

- Islamy, M. I. (2001). Agenda Kebijaksanaan Reformasi Administrasi Negara. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(1), 13-30.
- Isnaini, K. N., Winarno, W. W., & Henderi, H. (2018). Evaluasi Kepatuhan Logical dan Physical Security Terhadap Kebijakan Pengamanan Data. *Jurnal Ilmiah IT CIDA*, 4(1).
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2).
- Kharisma, D., & Yuniningsih, T. (2017). Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 770-781.
- Khoiriyah, L., & Padmawati, R. S. (2021). Pendekatan Dinas Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan Dasar Maternal Pada Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam Di Kabupaten Merangin. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*
- Khoirudin Nais, A. (2017). EFEKTIVITAS PELATIHAN OTOMOTIF MOTOR DI BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN KUDUS DALAM UPAYA PENGENTASAN PENGANGGURAN
- Maryam, S., & Susilawati, S. (2023). Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Merangin Tahun 2021 (Studi Kasus Pemberdayaan Di Permukiman Suku anak dalam Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan). *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 24-34.
- Mat Syuroh. (2011). Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Masyarakat Terasing di Indonesia. Palembang: Sokolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. *Jurnal Sosiohumanika*. 4(2): 229.
- Mayliza, M., & Adiando, A. (2019). Strategi Pemberdayaan Komunitas suku anak dalam Terpencil (KAT) Suku Bonai. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 41-46.
- Ma'mun, S. (2019). Evaluasi Efektivitas Program Pembinaan Lanjut Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan. *Reformasi*, 9(1), 31-44.
- Miles, M.B, Huberman, A.M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Third Edition. USA: Sage Publications.
- M.Ridwan, O. L. (2020). Konsep Rumah Tangga BerPHBS Pemukiman Rombong Ganta Pada Suku Anak Dalam Di Kabupaten Merangin. *Jurnal Kesmes Jambi*, 48-52.
- Munandar, M., & Mikail, K. (2022). GENELOGI DAN ETNOGRAFI MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA: STUDI KASUS SUKU TOGUTIL, BADUY DAN SAKAI. *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam*, 2(2), 146-156.
- Nanang, M. H. D. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satpol PP Dalam Menertibkan Usaha Billiard DI Kota pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

- Nurmawan, Aldi Rinaldi, Kamalah Saadah, and Sulistia Suwondo. "Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart City Kota Bandung." Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar. Vol. 10. No. 1. 2019.
- Nurdin, M. d. (2013). Kehidupan Keagamaan Suku Anakn Dalam Di Dusun Senami III Desa Jebak Kabupaten Batanghari Jambi. Kontekstualita, 57 141.
- Pambudi, F. (2021). Implementasi Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Suku Terasing. Journal of Education, Cultural and Politics, 95-97.
- Pane, T., TULUSAN, F., & Tampi, G. B. (2020). Efektivitas Unit Layanan Administrasi Dalam Pengelolaan Data Di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(91).
- Pratama, F. S., & Hadi, A. A. (2022). Sejarah Dan Perkembangan Kehidupan Suku Anak Dalam Kabupaten Merangin Provinsi Jambi (2011-2019). JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam, 4(1), 14-26.
- Putra, A. A., & Amir, L. (2022). Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Suku Anak Dalam. Mendapo: Journal of Administrative Law, 3(2), 70-83.
- Safriza & Maryani (2021).Efektivitas Program Rumah Khusus Nelayan Di Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Jurnal Kebijakan Publik, 12(2), 55-112
- Setiyadi, A. R. (2020). Isolasi Masyarakat Terasing:Kajian Kegiatan PKSMT Pada Suku Anak Dalam. Jurnal Pendidikan Sosial, 92.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulastri, I. (2021). Peran dinas social Sarolangun dalam pemberdayaan suku anak dalam (SUKU ANAK DALAM) untuk memenuhi kebutuhan primer. Jurnal Al Ijtima'iyyah, 7(1).
- Sutrisno, Edy. 2007. Manajemen Sumberdaya Manusia. Kencana Jl. Tamba Raya No.23 Rawa Mangun : Jakarta.
- Takiddin. (2014). Nilai-nilai Kearifan Budaya Lokal Oang Rimba (Studi kasus minoritas rimba di kecamatan air hitam provinsi jambi). Sosio Didaktika, 161-169.
- Trenggano, Maryam, et al. (2020)"Analisis Implementasi Kebijakan PemberdayaanKomunitasuku anak dalamat Terpencil di Kabupaten Buru Provinsi Maluku." Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah 12.2 : 97 112.
- ULU, T. D. K. M. (2014). EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN MAHAKAM ULU. (Lejiu,2014)
- Wandi. (2016). Konflik Sosial Suku Anak Dalam (Orang Rimba) Di Provinsi Jambi. Simulacra, 195-207.

- Winarno, Budi. 2012 Kebijakan Publik. Caps Jl. Cempaka Putih No.8 Gejayan : Yogyakarta
- Winarno Budi. (2008). Kebijakan Publik, Teori dan Proses., Buku Kita, Jakarta.
- Yanto, F. (2019). Sejarah Pembinaan terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi (1970-2014). Jurnal Ilmiah Dikdaya, 9(2), 244-256.
- Yunus, M. (2022) Strategi Pendekatan Komunikasi Partisipatif dalam membangun Trust Suku Anak Dalam (SUKU ANAK DALAM) terhadap Program Pembangunan yang berkelanjutan di Sarolangun-Bangko Provinsi Jambi. Jurnal Ekopendia : Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 7(11), 63-76.
- PERPRES, Peraturan Presiden RI Nomor 186 Tahun 2014. Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil
- PERMENSOS, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 12 Tahun 2015. Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014